

## **FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI BELANJA MODAL**

**Muhariyanto<sup>1</sup>, Walid Rudianti<sup>2</sup>, Ghonimah Zumroatun Ainiyah<sup>3</sup>**

*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tamansiswa Banjarnegara<sup>1,2,3</sup>*

[\*eny.wsb@gmail.com<sup>3</sup>\*](mailto:eny.wsb@gmail.com)

---

### **Abstract**

*An issue that is often heard among the public in APBD management is allocating capital expenditure as an effort to increase economic growth. This research aims to examine the influence of Regional Original Income, General Allocation Funds, Special Allocation Funds on economic growth through Capital Expenditures in district/city governments in Central Java province in 2015-2019. The research data used in this research comes from secondary data. The method in this research uses a quantitative method with a saturated sample, meaning that the entire population is sampled. The population used is all districts/cities in Central Java province. The data analysis technique used is path analysis using SPSS as a statistical test tool. The research results prove that Regional Original Income directly has a significant effect on Economic Growth, while General Allocation Funds and Special Allocation Funds directly have an insignificant effect on economic growth. Capital expenditures have no direct effect on economic growth. Regional Original Income, General Allocation Funds and Special Allocation Funds have a significant effect on Capital Expenditures. Regional Original Income, General Allocation Funds and Special Allocation Funds have no effect on Economic Growth through the intervening variable Capital Expenditure. The implication of this research is that there are differences in the results of previous research and adding the capital expenditure variable as an intervening variable.*

**Keywords:** *regional original income, general allocation funds, special allocation funds, economic growth, capital expenditure*

---

### **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pasal 2 mengamanatkan bahwa Program Pembangunan Nasional periode 2005 - 2025 dilaksanakan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Amanat tersebut yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan

visi, misi, dan program dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Wujud dari visi, misi dan pelaksanaan program adalah penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKAKL) dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kemterian Negara/Lembaga dinyatakan bahwa dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja tersebut diperlukan indikator kinerja, standar

---

biaya dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 17 mengamanatkan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Implementasi kewenangan daerah melalui perencanaan daerah dengan tujuan untuk mencapai: menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah secara efektif; mempercepat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; mempercepat dan meningkatkan mutu, kuantitas, dan mutu pelayanan publik; kemajuan dan sifat penyelenggaraan pemerintahan; dan mempertahankan keunikan adat, tradisi, dan budaya lokal.

Pembangunan dilaksanakan dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan pembangunan tersebut harus tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Proses penyusunan APBD

didahului dengan usulan rencana kerja Organisasi perangkat daerah. Pemerintah Daerah bersama – sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian anggaran biaya.

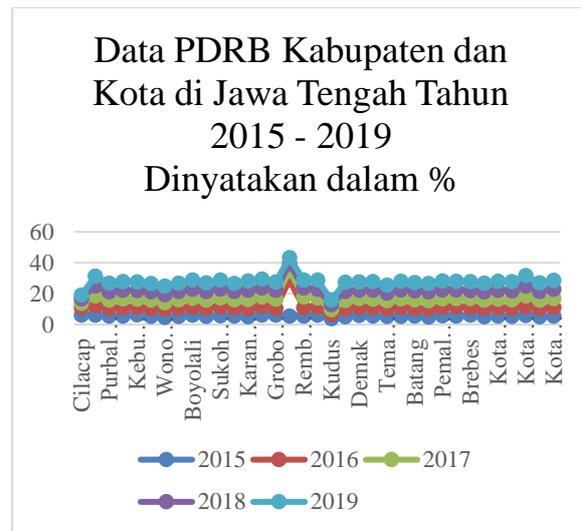
Sumber pendapatan daerah di kabupaten/kota, menurut UU no. 23 tahun 2014 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan dana transfer. Dana transfer dari pusat yang dimaksud yaitu dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana Desa. Dana perimbangan yang dimaksud terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil.

Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran berupa belanja modal untuk menambah aset. Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung kewajiban pemerintah memberikan pelayanan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Trend realisasi anggaran belanja modal pada tiap kabupaten / kota se Jawa Tengah pada tahun 2015 – 2019.

Oleh mainstream economist, Gross Domestic Product (GDP) juga disebut

dengan Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi tolok ukur kesejahteraan masyarakat dengan argumentasi bahwa PDB per orang merefleksikan rata-rata pendapatan dan pengeluaran seseorang. Berdasarkan berita yang dirilis pada ekonomi.bisnis.com pada tanggal 2 Agustus 2019, provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mendongkrak perekonomian nasional. Sehingga provinsi Jawa Tengah memasang target pertumbuhan PDRB sebesar 7% di tahun 2023. Sedangkan dalam 5 tahun terakhir atau periode 2015—2019, PDRB Jateng masing-masing tahun bertumbuh 5,45%, 5,76%, 5,47%, 5,49% dan 5,45%.

Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan PDRB setiap daerah. Jawa Tengah terdiri dari 35 kabupaten dan kota yang berkontribusi dalam mencapai tujuan tersebut. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi setiap kabupaten dan kota di Jawa Tengah bervariasi dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi per tahun pada setiap kabupaten /kota terjadi trend yang berbeda.



**Gambar 1. PDRB Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah**

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Dari gambar1 dapat dilihat bahwa laju PDRB di kabupaten/kota pada setiap tahun mengalami fluktuatif. Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan riset dengan hasil yang tidak konsisten. Diantaranya yaitu riset yang dilakukan oleh Nuarisa (2013) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal sedangkan Mawarni et al., (2013) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap belanja modal dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Riset yang dilakukan Siagian (2018) mendukung riset sebelumnya

yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Riset sejenis juga dilakukan oleh AriniS (2016) menyatakan Belanja Modal memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi hal tersebut berbeda dengan hasil riset yang dilakukan oleh Waryanto (2017) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dari hasil riset yang tidak konsisten dan belum banyak peneliti yang melakukan riset terkait hal tersebut, menjadi alasan untuk melakukan pengujian keterkaitan antara PAD, DAU dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mediasi belanja modal. Riset ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU dan pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan belanja modal sebagai variabel mediasi

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Teori pertumbuhan ekonomi yang digunakan pada riset ini mengacu pada Smith (1776) dimana pertumbuhan ekonomi didasarkan pada dua factor penting yaitu factor output total dan factor pertumbuhan penduduk. Faktor output total diukur dengan sumber

daya alam yang dimiliki, sumber daya manusia dan adanya persediaan modal. Sedangkan, factor pertumbuhan penduduk meliputi pertumbuhan penduduk yang nantinya digunakan sebagai indicator dalam penentuan luas pasar dan pertumbuhan ekonomi.

### **Teori Otonomi Daerah**

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan otonomi daerah sendiri adalah agar pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus daerahnya sendiri guna meningkatkan efektivitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan nasional bagi penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan yang bersifat nirlaba. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas administratif. (Kolinug, Tanpa Tahun)

### **Belanja Modal**

Menurut Halim (2004) belanja modal adalah belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan asset yang menjadi

kekayaan daerah dengan masa manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran. Pembelian asset tersebut nantinya akan menimbulkan biaya pemeliharaan rutin. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah nantinya sudah termasuk pada biaya pemeliharaan rutin yang bersifat mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas dari asset tersebut (Standar Akuntansi Pemerintah). Komponen belanja modal bisa berupa pembelian tanah, Gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan modal fisik lainnya. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah. Pada dasarnya, belanja modal dapat dihitung dengan menghitung seluruh anggaran yang digunakan dalam membentuk suatu aset tetap/inventaris termasuk biaya perolehan sampai kondisi siap dipakai.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita di produksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita (Boediono, 1985). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri utama proses pembangunan, yang diperlukan sehubungan dengan realitas pertumbuhan penduduk. Dengan

bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan otomatis meningkat (Purwanto, 2013). Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan Tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB).

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah adalah sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2001). Pendapatan asli suatu daerah merupakan kumpulan item-item penerimaan pajak, termasuk pajak dan retribusi daerah, item-item PNBP termasuk kinerja usaha daerah, item-item pendapatan investasi, dan pengelolaan sumber daya alam (Purwanto, 2013).

### **Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk menyeimbangkan kapasitas fiskal antar daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (kemenkeu.go.id). DAU sendiri pada dasarnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu Dana Alokasi Umum Provinsi dan Dana Alokasi Umum Kabupaten dan Kota.

Besaran pendanaan yang diberikan berdasarkan keputusan presiden dengan mempertimbangkan formula kompleks seperti jumlah penduduk dan luas wilayah. Kunchoro (2004) DAU bersifat “block grant” yang penggunaannya diberikan kepada daerah sesuai prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah.

### **Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan sumber daya yang dialokasikan kepada daerah tertentu dari pendapatan APBN dengan tujuan mendanai kegiatan khusus yang menjadi perhatian daerah dan sejalan dengan prioritas nasional ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id)). Menurut Anggoro (2017), alokasi DAK daerah berbeda dengan alokasi DAU, dimana DAU tidak mewajibkan pemerintah daerah untuk menyediakan pendanaan yang memadai. Di sisi lain, untuk mempertahankan DAK, pemerintah daerah perlu menyediakan dana yang sesuai dengan dana yang dianggarkan pada APBD. Pendanaan agunan yang diberikan paling sedikit sebesar 10% dari DAK. Namun, jika mempunyai kemampuan finansial tertentu (daerah yang selisih penerimaan umum APBD dengan belanja pegawai nol atau negatif), tidak perlu mengalokasikan dana yang cukup.

### **Hipotesis**

H1 : Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

H2 : Dana alokasi umum berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

H3 : Dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

H4 : Belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

H5 : Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal

H6 : Dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal.

H7 : Dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal.

H8 : Pendapatan asli daerah berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.

H9 : Dana alokasi umum berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan

Ekonomi melalui belanja modal.

H10 : Dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.

**METODE PENELITIAN**

Riset ini merupakan jenis riset kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang berasal dari dokumen yang telah tersedia. Populasi pada riset ini yaitu seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 – 2019. Teknik pemilihan sampel yang digunakan pada riset ini yaitu dengan menggunakan teknik sampel jenuh. Teknik sampel jenuh yaitu mengambil semua data yang ada dan kemudian dijadikan sampel secara penuh.

Riset ini menggunakan variable intervening berupa belanja modal, variable dependen berupa pertumbuhan ekonomi dan variable independent berupa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum serta dana alokasi khusus. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan analisis jalur dengan menggunakan SPSS sebagai alat analisis data

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Uji Normalitas**

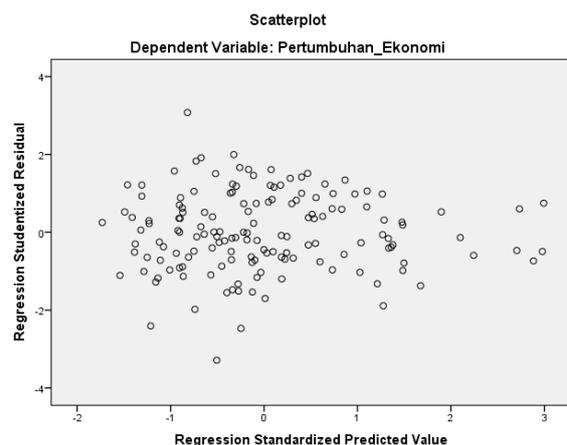
**Tabel 1. Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		152
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0452044
	Std. Deviation	,29048054
	Asymp. Sig. (2-tailed)	,200 <sup>c,d</sup>

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 1, dapat diperoleh jumlah sampel yang digunakan pada riset ini adalah 152 dan asymptotic signyficance dengan sebesar  $0,200 > 0,05$ . Sehingga, dapat disimpulkan data riset ini terdistribusi normal.

**Uji Heterokedastisitas**



Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan gambar 2, dapat dilihat hasil uji heterokedastisitas nampak titik data menyebar diatas dan di bawah atau sekitar angka 0 (nol). Penyebaran data tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

**Uji Multikolinieritas**

**Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PAD	,650	1,538
DAU	,471	2,122
DAK	,497	2,010
Belanja_Modal	,524	1,907

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat dari nilai VIF dan nilai toleransi maka masing - masing variabel independen nilainya yaitu PAD = toleransi 0,650 sedangkan VIF sebesar 1,538, DAU = toleransi 0,471 sedangkan VIF 2,122, DAK toleransi 0,497 sedangkan VIF 2,010 dan Belanja Modal toleransi 0,524 sedangkan VIF 1,907. Hal tersebut menegaskan bahwa tidak terjadi multikolinieritas karena nilai toleransi > 0,01 dan nilai VIF kurang dari 10.

**Uji Autokorelasi**

**Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi**

Model	Durbin-Watson
1	2,114

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

Dari tabel 3 nampak nilai Durbin Watson (d) sebesar 2,114. Dengan jumlah variabel independen (K ) = 4 dan jumlah data (n) = 152. Setelah dilihat pada tabel Durbin Watson (DW) maka nilai dL= 1,6812 dan dU =1,7891. Nilai Durbin Watson(d) sebesar 2,114 lebih besar dari batas bawah (dL) yakni 1,6812 dan lebih kecil dari batas (4-dU) 4-1,7891 = 2,211. uji durbin watson dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi.

**Uji Hipotesis**

**Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis Struktur 1**

Model	Unstandardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	
	1 (Constant)	5,072	
PAD	1,785E-12	,000	,000
DAU	3,207E-14	,000	,824
DAK	-3,115E-13	,000	,267
Belanja_Modal	-1,797E-13	,000	,512

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat sampel yang digunakan yaitu sebanyak 152 dengan variabel Pendapatan Asli Daerah memperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,00 < 0,05$  maka H1 diterima. Artinya PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh variabel Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar  $0,824 > 0,05$  maka H2 tidak diterima. Artinya DAU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh variabel Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar  $0,267 > 0,05$  maka H3 tidak diterima. Artinya DAK tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh variabel Belanja Modal terhadap Pertumbuhan ekonomi sebesar  $0,512 > 0,05$  maka H4 tidak diterima. Artinya belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi Struktur 1**

Model	R	R Square
1	,421 <sup>a</sup>	,177

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan table 5 koefisien Determinan (KD) pada PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan

Ekonomi adalah 0,177 atau 17,7%. Sedangkan sisanya sebesar 82,3% menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

**Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis Struktur 2**

Model	Unstandardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	
1 (Constant)	36824347990	327721880	,263
PAD	,000	60,000	
DAU	,259	,101	,011
DAK	,172	,041	,000
	,280	,081	,001

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 6 pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal sebesar  $0,011 > 0,05$  maka H5 diterima. Artinya PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Pengaruh variabel Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal sebesar  $0,000 > 0,05$  maka H6 diterima. Artinya DAU berpengaruh terhadap belanja modal. aPengaruh variabel Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal sebesar  $0,01 > 0,05$  maka H7 diterima. Artinya DAK berpenaruh terhadap belanja modal.

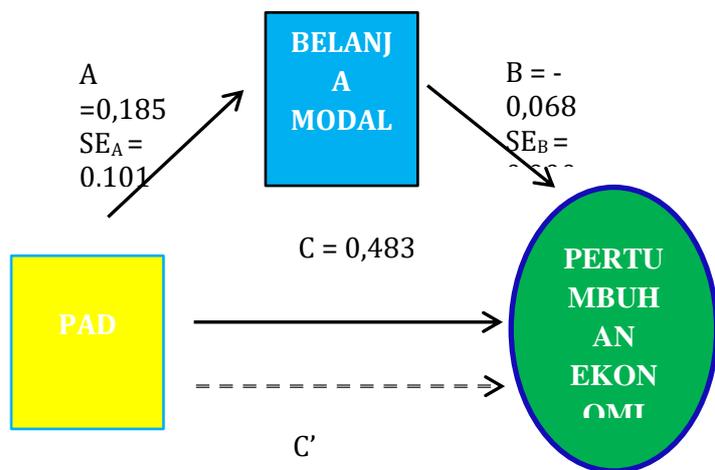
**Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi Struktur 2**

Model	R	R Square
1	,690 <sup>a</sup>	,476

Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 7, koefisien Determinan (KD) pada PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal adalah 0,476 atau 47,6%. Sedangkan sisanya sebesar 52,4% menjelaskan bahwa Belanja modal dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.



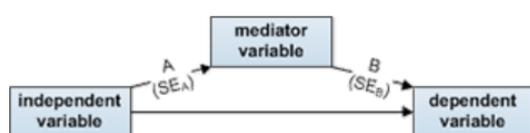
**Gambar 3. Struktur Jalur 3**

Berdasarkan struktur jalur pada gambar 3 bahwa pengaruh langsung variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,483. Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh tidak langsung dari variabel Pendapatan Asli

Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal yaitu dengan pengujian melalui kalkulator sobel test.

A merupakan nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal sebesar 0,185, sedangkan B merupakan nilai koefisien Belanja Modal terhadap Pertumbuhan ekonomi sebesar -0,068. SE<sub>A</sub> merupakan nilai standar error dari pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal sebesar 0,101 sedangkan SE<sub>B</sub> merupakan nilai standar error dari pengaruh Belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,000.

Dengan data tersebut dan dimasukkan ke dalam kalkulator sobel test dengan hasil sebagai berikut:



A:  ?

B:  ?

SE<sub>A</sub>:  ?

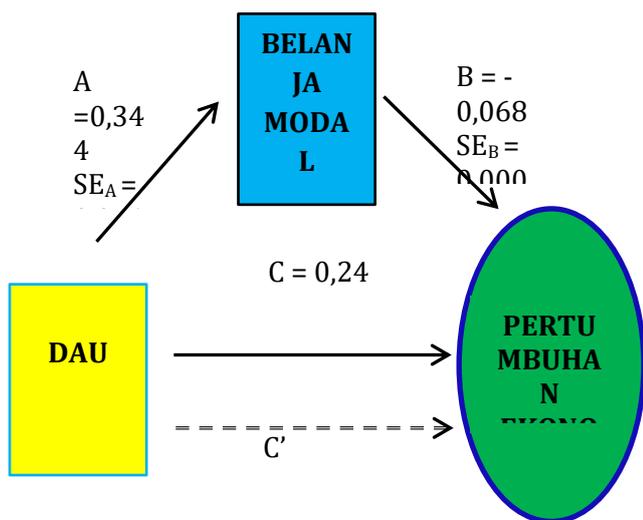
SE<sub>B</sub>:  ?

**Calculate!**

**Sobel test statistic:** -1.83167652  
**One-tailed probability:** 0.03349981  
**Two-tailed probability:** 0.06699963

**Gambar 4. Hasil Sobel Test Struktur 2**

Berdasarkan dari gambar 4 diatas hasil dari sobel test diperoleh nilai Z sebesar -1,83167652. Nilai z lebih kecil dari 1,96 sehingga dapat dikatakan variabel Pendapatan Asli Daerah secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi melalui Belanja Modal. Hasil perhitungan dengan kalkulator sobel test dengan hasil bahwa Belanja Modal tidak mampu memediasi hubungan pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dengan demikian H8 tidak diterima.

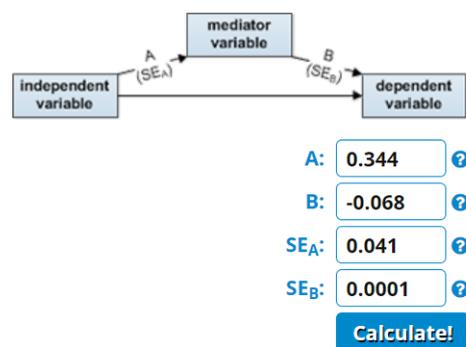


**Gambar 5. Struktur Jalur 4**

Berdasarkan struktur jalur pada gambar 5 dapat dilihat pengaruh langsung variabel Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,24. Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh tidak langsung dari variabel Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi

melalui Belanja Modal yaitu pengujian melalui kalkulator sobel test. A merupakan nilai koefisien Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal sebesar 0,344, sedangkan B merupakan nilai koefisien Belanja Modal terhadap Pertumbuhan ekonomi sebesar -0,068. SEA merupakan nilai standar error dari pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal sebesar 0,041 sedangkan SEB merupakan nilai standar error dari pengaruh Belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,000.

Dengan data tersebut dan dimasukkan ke dalam kalkulator sobel test dengan hasil sebagai berikut:

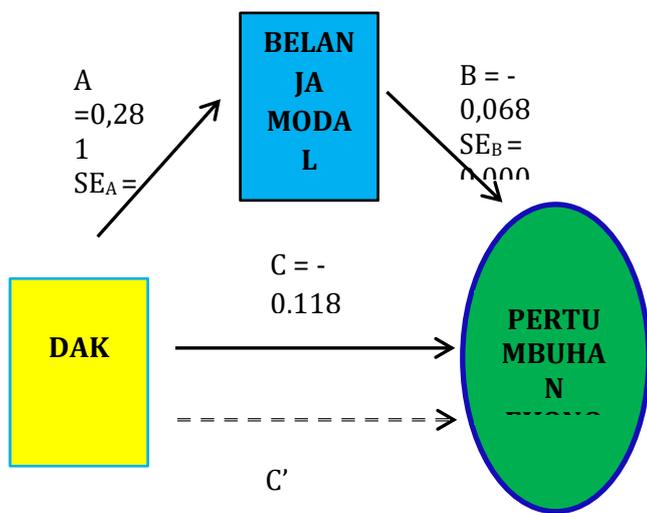


Sobel test statistic: -8.38960531  
 One-tailed probability: 0.0  
 Two-tailed probability: 0.0

**Gambar 6. Hasil Sobel Test Struktur 5**

Berdasarkan gambar 6, hasil dari sobel test diperoleh nilai Z sebesar -8,38960531. Nilai z lebih kecil dari 1,96 sehingga dikatakan variabel Dana Alokasi Umum

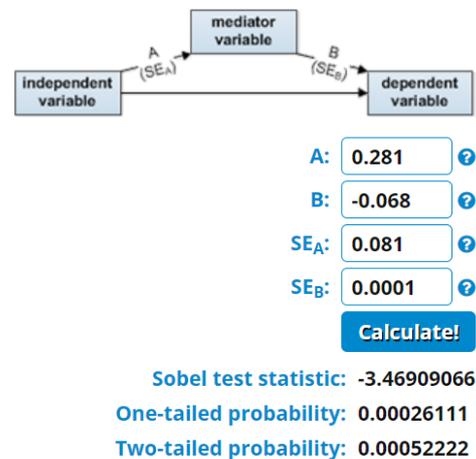
secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan ekonomi melalui Belanja Modal. Hasil perhitungan dengan kalkulator sobel test dengan hasil bahwa Belanja Modal tidak mampu memediasi hubungan pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dengan demikian H9 tidak diterima.



**Gambar 7. Struktur Jalur 5**

Berdasarkan struktur jalur pada gambar 7 bahwa pengaruh langsung variabel Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,281. Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh tidak langsung dari variabel Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal yaitu dengan uji sobel test. A merupakan nilai koefisien Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal sebesar 0,281, sedangkan B merupakan nilai koefisien Belanja Modal terhadap

Pertumbuhan ekonomi sebesar -0,068. SEA merupakan nilai standar error dari pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal sebesar 0,081 sedangkan SEB merupakan nilai standar error dari pengaruh Belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0001. Dengan data tersebut dan dimasukkan ke dalam kalkulator sobel test dengan hasil sebagai berikut:



**Gambar 8. Hasil Sobel Test 5**

Berdasarkan gambar 8 diatas Hasil dari sobel test diperoleh nilai Z sebesar -3,46909066. Nilai z lebih kecil dari 1,96 sehingga dapat dikatakan variabel Dana Alokasi Khusus secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil perhitungan manual yang diperkuat dengan sobel test dengan hasil bahwa Belanja Modal tidak mampu memediasi hubungan pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan

Ekonomi. Dengan demikian H10 tidak diterima

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Pada riset ini, menunjukkan PAD berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi oleh Robert Solow yang menyatakan pengaruh tabungan/modal, populasi/tenaga kerja, dan teknologi terhadap tingkat output dan pertumbuhan ekonomi. PAD merupakan komponen yang menyusun struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD dan sebagai faktor pendorong dalam pertumbuhan ekonomi (kemenkeu. 2017).

Riset ini mendapat dukungan dari peneliti sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Siagian (2018) dan Siswiyanti (2015). Hasil riset Siagian (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi hal senada juga disampaikan oleh Siswiyanti (2015) dalam risetnya yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

PAD secara langsung berpengaruh dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

PAD juga merupakan tolok ukur tingkat kemandirian daerah membiayai kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan keuangan daerah. Secara logika dengan adanya kewenangan yang diberikan dalam penggunaan PAD sebagai perwujudan desentralisasi tersebut, memacu pemerintah daerah dalam menentukan langkah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat memiliki efek domino. Dengan tingginya pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan daya beli masyarakat yang nota bene akan memicu PAD melalui pajak daerah. Sehingga semakin tinggi PAD maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin tinggi.

### **Pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Hasil riset ini menunjukkan DAU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 pasal 1 bahwa DAU merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Hasil riset ini didukung dengan oleh peneliti sebelumnya. Salah satu hasil riset yang dilakukan yaitu oleh Dewi dan Suputra (2017) yang menyatakan bahwa DAU tidak

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Riset ini membuktikan bahwa DAU secara langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. DAU merupakan dana transfer pemerintah pusat kepada daerah yang dijabarkan dalam bentuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung yang antara lain dipergunakan untuk membayar gaji pegawai dan belanja kebutuhan rutin sehingga tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

### **Pengaruh DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Dari analisa yang dilakukan diperoleh DAK secara langsung tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan tokoh neoklasik teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar yang menyatakan bahwa perlunya pembentukan modal (investasi) sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap/teguh.

Riset yang dilakukan oleh Anwar et al., (2016) menunjukkan bahwa DAK tidak terdapat pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil riset ini mendapat dukungan dari riset sebelumnya yang dilakukan oleh Widyasari (2013) yang menyatakan bahwa

DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

DAK merupakan dana transfer yang digunakan untuk belanja yang merupakan urusan pusat sehingga bidang dan jenis kegiatan sudah ditentukan. DAK yang di luncurkan kedaerah dalam bentuk kegiatan fisik dan non fisik (kemenkeu, 2020). Berdasarkan ketentuan tersebut, daerah hanya sebagai pelaksana kegiatan sehingga arah kebijakan daerah tidak dapat dilaksanakan dengan anggaran yang bersumber dari DAK. Dana Aloksi Khusus yang diprogramkan oleh pusat lebih banyak pada kegiatan yang bersifat pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak menyentuh pertumbuhan ekonomi.

### **Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Setelah dilakukan analisa data belanja modal tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut mendukung yang disampaikan oleh teori pertumbuhan Schumpeter yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan (entrepreneurship).

Riset yang dilakukan oleh Mawarni et al., (2013) menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan

ekonomi. Hal senada juga disampaikan oleh Fajri (2016) yang menyatakan bahwa Belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sumatera.

Riset ini memperoleh hasil yang didukung oleh riset sebelumnya dan membuktikan bahwa Belanja Modal tidak mempunyai pengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal merupakan proses membentuk modal yang bersifat menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Harapan pemerintah mengalokasikan anggaran untuk belanja modal selain memberikan pelayanan kepada masyarakat juga untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan hasil riset ini menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga kebijakan dalam pengalokasian anggaran melalui belanja modal belum tepat.

### **Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal**

Hasil riset pada variabel diperoleh PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Untuk membentuk belanja modal tersebut dibutuhkan sumber pembiayaan yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. PAD sebagai salah satu sumber pendapatan memiliki peran dalam membentuk belanja modal.

Riset ini didukung oleh riset sebelumnya yang dilakukan oleh Mawarni et al., (2013) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Hasil riset tersebut senada dengan riset yang dilakukan oleh Juniawan dan Suryantin (2018) bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian daerah. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan melakukan belanja investasi berupa pemenuhan sarana prasarana. Sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah sebagai contoh yaitu pembangunan infrastruktur dan gedung pemerintah. Sehingga PAD berbanding lurus dengan belanja modal. Semakin besar PAD maka semakin besar pula belanja modalnya.

### **Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal**

Hasil riset bahwa DAU mempunyai kontribusi dan pengaruh dalam pembentukan belanja modal. Hal tersebut dikarenakan DAU merupakan dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dari pendapatan APBN dengan tujuan untuk menyeimbangkan kapasitas fiskal antar daerah.. Sesuai ketentuan yang berlaku

bahwa dana transfer tersebut disusun dalam APBD dalam bentuk belanja daerah. DAU bersifat block grant yang pemanfaatannya diserahkan kepada arah kebijakan daerah masing-masing sesuai skala prioritas dan kebutuhan (Kemenkeu,2020).

Riset ini menunjukkan bahwa DAU mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal hal tersebut didukung hasil riset sebelumnya. Riset sebelumnya yang mendukung yaitu riset oleh Mawarni et al., (2013) menyatakan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja modal. Hal itu senada dengan hasil riset yang dilakukan oleh Nuarisa (2012) menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hasil riset sebelumnya dipertegas dengan riset yang dilakukan oleh Juniawan dan Suryantin (2018) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diwujudkan dengan memberikan fasilitas serta sarana prasarana yang dialokasikan dalam APBD melalui belanja modal. DAU merupakan sumber pembiayaan untuk mendukung dalam menyediakan sarana prasarana. Sehingga semakin tinggi DAU yang diterima dari Pusat maka semakin tinggi

pula anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Modal.

### **Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal**

Hasil riset menunjukkan DAK masih memiliki peran penting dalam pembentukan belanja modal. Hal tersebut secara eksplisit terdapat dalam Undang-undang nomer 23 tahun 2014 pasal 298 yang menyatakan bahwa belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan nonfisik.

Riset ini diperkuat riset sebelumnya yang dilakukan oleh Naurisa (2013) menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Hal senada juga dinyatakan oleh Juniawan dan Suryantini (2018) bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Sebagaimana tersebut diatas bahwa belanja DAK diprioritaskan untuk membiayai kegiatan fisik. Kebijakan pemerintah pusat khususnya sampai saat ini masih terfokus pada penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan dan capaian program. Riset membuktikan bahwa DAK berbanding lurus terhadap belanja modal. Sehingga semakin besar DAK yang ditransfer ke daerah maka semakin besar pula belanja modal.

### **Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal**

Dari hasil riset diperoleh nilai hubungan tidak langsung PAD terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Hal tersebut membuktikan bahwa belanja modal tidak dapat memediasi pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian teori Adam Smith terbukti bahwa perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada penambahan penduduk yang akan memperluas pasar serta mendorong spesialisasi dan bukan disebabkan oleh ketersediaan modal.

Riset ini mendapat dukungan dari peneliti sebelumnya yaitu yang dilakukan oleh Arini S (2016) menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut membuktikan bahwa secara empiris belanja modal tidak dapat digunakan sebagai mediasi dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal senada juga disampaikan Irvan dan Karmini (2016) yang menyatakan belanja modal bukan merupakan variabel intervening dalam dana

perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali,

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah merupakan bagian dari pendapatan daerah yang menyusun struktur APBD. Namun hasil riset membuktikan bahwa belanja modal tidak dapat digunakan sebagai variabel intervening dalam pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah kabupaten/kota provinsi Jateng pada periode tahun 2015-2019 dalam mengalokasikan belanja modal tidak terfokus pada jenis belanja yang berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi dan lebih mengutamakan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif seperti pembangunan gedung pemerintah, kendaraan dinas atau peralatan kantor lainnya.

### **Pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal**

Hasil riset membuktikan bahwa belanja modal tidak mampu memediasi pengaruh DAU sebagai salah satu sumber pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian teori yang dikemukakan oleh Joseph A. Schumpeter terbukti. Teori yang dikemukakan yaitu bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan

oleh kemampuan kewirausahaan (entrepreneurship).

Riset ini mendapat dukungan dari riset sebelumnya yang dilakukan oleh Uhise (2013) yang menyatakan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Hal tersebut juga didukung oleh riset yang dilakukan oleh Adi dan Kusuma (2016) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak dapat mempengaruhi hubungan antara DAU terhadap pertumbuhan ekonomi

DAU merupakan dana transfer dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (PP nomor 12 tahun 2019) sehingga pertumbuhan ekonomi bukan merupakan tujuan dari diluncurkannya DAU. Dengan dasar tersebut maka jika pemerintah daerah tidak menargetkan kenaikan pertumbuhan ekonomi, maka anggaran belanja yang disusunpun tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **Pengaruh DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Modal**

Dari hasil riset diperoleh belanja modal tidak dapat bertindak sebagai mediator dalam pengaruh DAK terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil riset ini membuktikan teori yang dikemukakan oleh Joseph A. Schumpeter. Teori yang dikemukakan yaitu

bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan (entrepreneurship).

Riset ini mendapat dukungan dari riset yang dilakukan oleh Widyasari (2013) yang menyatakan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Serta riset yang dilakukan oleh Anwar et al., (2016) yang menyatakan bahwa DAK tidak ada pengaruh dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

DAK yang bersumber dari dana transfer pusat merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam APBD (PP nomor 12 tahun 2019). Akan tetapi bidang dan kegiatan sudah ditentukan dari pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah tidak dapat merubah sesuai kebijakannya sendiri meskipun pemerintah daerah sudah menentukan arah kebijakan dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian belanja modal yang bersumber dari DAK tidak dapat menjadi mediasi dalam laju pertumbuhan ekonomi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil riset ini dapat disimpulkan bahwa PAD secara langsung berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, DAU secara langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, DAK secara langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, belanja modal secara langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal, DAU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal, DAK tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.

Riset ini secara umum belanja modal tidak mampu dijadikan mediator dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, sehingga penyusunan APBD jika mengalokasikan belanja modal sebaiknya dikurangi dan dialihkan untuk jenis belanja yang langsung menyentuh kepada perekonomian masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari dan Rifat Kevin Kusuma. 2016. Pengaruh PAD (Pad) Dan DAU (Dau) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa). *Journal of Economic and Economic Education*
- Ainiyah, Ghonimah Zumrotun. 2021. *Ekonomi Makro dan Pertumbuhannya*, Cetakan Pertama, Banyumas: CV. Amerta Media
- Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Anwar, Meilita Lukitasari et al., . 2016. Pengaruh Dau, Dak, Pad Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan (Kota Manado Tahun 2001-2013). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*.
- Ardhani, Pungky. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, Dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah). *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Arini S, Prima Rosita. 2016. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Kalimantan. *JRAMB, Prodi Akuntansi, Faku;tas Ekonomi, UMB Yogyakarta*
- Badan Pusat Statistik. 2020. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Persen), 2010 – 2019I <https://jateng.bps.go.id/statictable>
- Boediono. (1985). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Dewi, Ni Wayan Ratna. Suputra, Dewa Gede Dharma. 2017. Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan Belanja Modal Terhadap

- Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*
- Fajri, Ahmad. 2016. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-Provinsi di Sumatera. *E-Jurnal Perspektif Ekonomidan Pembangunan Daerah*.
- Faruq, Ubaid Al dan Edi Mulyanto. 2017. *Sejarah Teori-Teori Ekonomi*, Cetakan Pertama, Pamulang : Unpam Press ISBN: 978-602-61660-1-2
- Halim, Abdul. 2001. Manajemen Keuangan Daerah (Bunga Rampai). Penerbit UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Irvan, I Putu dan Ni Luh Karmini. 2016. Pengaruh PAD, Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *E-Journal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*
- Juniawan, Made Ari dan Ni Putu Santi Suryantin. 2018. Pengaruh PAD, DAU Dan DAK terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Perhitungan DAU. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Diakses pada tanggal 30 Desember 2020 dari (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *APBN adalah Instrumen Pendorong Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Nasional* diakses dari (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/>)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia . Diakses pada 23 November 2023 dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaqa=saja-jenis-jenis-dana-perimbangan>.
- Kharti, Irene Swastiwi Viandari. 2018. *Apa Itu Pertumbuhan Ekonomi Dan Teori-Teori Pendukungnya* diakses dari (<https://www.ruangguru.com/blog/>)
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga.
- Mawarni *et al.,.* 2013. Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*
- Nuarisa, Sheila Ardhian. 2013. Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Pemerintah Daerah No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Lembaga Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang *Dana Perimbangan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Purwanto, Fiona Puspita Devi (2013), Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kab/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2011
- Smith, Adam. 1776. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: Methuen & Co. LTD.
- Siagian, Erlinda. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2016. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.

- Simanjuntak, Jontro. 2018. *Ekonomi Makro Kepulauan Riau* cetakan pertama. Juli 2018 Penerbit CV. Batam Publisher
- Siswiyanti, Pungky. 2015. Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*
- Uhise, Stepvani. 2013. Dana Alokasi Umum (DAU) Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*
- Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025
- Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Waryanto, Puput. 2017. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Indonesian Treasury Review : Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*.
- Widyasari, Nurul. 2013. Pengaruh PAD (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) (Studi Empiris Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.